



# **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Imam Bonjol Gedung Buncai Lantai II Kelurahan Tarempa

e-mail [bakesbangpol@anambaskab.go.id](mailto:bakesbangpol@anambaskab.go.id)

**T A R E M P A**

**Kode Pos : 29791**

## **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 26 TAHUN 2021**

### **TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026**

#### **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat sewaktu-waktu berubah berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikumudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepulauan Anambas  
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



**ANDI AGRIAL, S.Pd**

Penyidik Muda / IV.c  
NIP. 19640809 199002 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Nomor : 26 Tahun 2021  
 Tanggal : 16 Agustus 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

| NO | TUJUAN                                                         | SASARAN STRATEGIS                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                    | SATUAN | PENJELASAN                                                                |                                                                                   |                                   | KETERANGAN/<br>KRITERIA                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |        | ALASAN                                                                    | FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                         | SUMBER DATA                       |                                                                                                                                  |
| 1. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas         |                                                                                                    | Nilai Reformasi Birokrasi                                                                                                                                  | Nilai  | Upaya Peningkatan AKIP dan Reformasi Birokrasi serta pelayanan masyarakat | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengelolaan Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas                                                  |
|    |                                                                | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas         | Nilai SAKIP                                                                                                                                                | Nilai  |                                                                           | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$                               |                                   |                                                                                                                                  |
|    |                                                                |                                                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                 | Nilai  |                                                                           | IKM                                                                               |                                   |                                                                                                                                  |
| 2. | Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa |                                                                                                    | Jumlah Konflik Sosial di Daerah                                                                                                                            | Kasus  | Upaya terjaganya kondisi dan situasi kondusif di daerah                   | $\frac{\text{Target}-(\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$ |                                   | Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan, agama, pembauran kebangsaan serta politik di daerah upaya pencegahan dini konflik sosial |
|    |                                                                | Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi                                                      | Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi                                                                                                                         | Kasus  |                                                                           | $\frac{\text{Target}-(\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$ |                                   |                                                                                                                                  |
|    |                                                                | Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini | Jumlah aparat dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini | Orang  |                                                                           | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$                               |                                   |                                                                                                                                  |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



**ANDI AGRIAL, S.Pd**

Pembina Muda / IV.c  
 NIP. 19640809 199002 1 002